

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- A.S.S Tambunan, 2005, *Hukum Militer Suatu Pengantar*, Pusat Studi Hukum Militer STHM, Jakarta.
- Achmad Ali, 2015, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Kencana, Jakarta.
- Adami Chazawi, 2005, *Pelajaran Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta.
- , 2008. *Hukum Pidana Bagian I*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- AL.Wisnubroto, 2014, *Praktek Persidangan Pidana*, Universitas Atmajaya, Yogyakarta.
- Andi Hamzah, 1968, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- , 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Elmarianti Saalino, 2020, *Hukum Militer di Indonesia*, Uwais Inspirasi Indonesia, Sidoarjo.
- Endriartono Sutarto, 2005, *Kewajiban Prajurit Mengabdikan Kepada Bangsa*, Puspen TNI, Jakarta.
- Frans Maramis, 2016, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Rajawali Pers-Jakarta
- Lilik Mulyadi, 2014, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Acara Hukum Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya bakti, Malang.
- Mahruz Ali, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika-Jakarta
- Moch Faisal Salam, 1996, *Hukum Acara Pidana Militer di Indonesia*, Bandung, Mandar Maju.
- , 2004, *Peradilan Militer Di Indonesia*, Mandar Maju Bandung
- Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta-

Yogyakarta.

- , 1985, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.
- Muhammad Rusli, 2006, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, PT RajaGrafindo persada, Jakarta.
- Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad, 1983, *Intisari Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Nanda Agung Dewantoro, 1987, *Masalah Kebebasan Hakim dalam Menangani Suatu Perkara Pidana*, Aksara Persada, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Poerwadarminta. 1999. Dalam Kamus Bahasa Indonesia. Balai Pustaka, Jakarta.
- R. Abdoel Djamali, 2010, *Pengantar Hukum Edisi Revisi*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Ramdlon Naning. 1982, *Menggairahkan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Disiplin Penegak Hukum dalam Lalu Lintas*, Bina Ilmu, Yogyakarta.
- Soejono dan H. Abdurahman, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, RinekaCipta, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Suharto dan Jonaedi Efendi, 2016, *Panduan Praktis Bila Menghadapi Perkara Pidana*, Kencana, Jakarta.
- Sumaryanti, *Peradilan Koneksitas Di Indonesia*, Bina Aksara, 1987, Jakarta
- Wirjono Prodjodikoro, 1990, *Perbuatan Melanggar Hukum*. Sumur. Bandung.
- , 2009, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.

Jurnal:

Andre G. Mawey, 2016, *Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum*, Jurnal Lex Crimen, Fakultas Hukum Unsrat.

Munsharid Abdul Chalim dan Faisal Farhan, 2015, *Peran dan Kedudukan Tentara Nasional Indonesia (TNI) Di Dalam Rancangan Undang- Undang Keamanan Nasional Di Tinjau Dari Prespektif Politik Hukum Di Indonesia*, Jurnal Pembaharuan Hukum, Fakultas Hukum Universita Islam Sultan Agung.

Praditha Rika Negara, 2014, *Pertimbangan Hukum oleh Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Anak yang Melakukan Penyalahgunaan Narkoba*, Jurnal Justitia Et Pax, Fakultas Hukum Universitas Atmajaya.

Supriyatna, 2004, *Pentingnya Hukum Disiplin Militer Ditinjau Dari Aspek Pembinaan Prajurit TNI*, Jurnal Sekolah Tinggi Hukum Militer.

Syamsul Ma'arif, 2014, *Prajurit Profesional-Patriot: Menuju TNI Profesional Pada Era Reformasi*, Jurnal Sosiologi Masyarakat, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia.

Skripsi:

B. R Ariyono, 2016, *Pertanggungjawaban Pidana Anggota Militer Terhadap Kasus Pembunuhan Anggota OPM dihubungkan dengan Ajaran Pengecualian Penjatuhan Pidana*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Pasundan.

Fatmawati Faharuddin, 2014, *"Proses Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Desersi Secara In Absensia di Pengadilan Militer III-*

16 Makassar”, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar.

Peraturan Perundang-Undangan:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1947 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentara/Militer (KUHPM)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96)